

# IMPOR BERAS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PRODUKSI DAN KONSUMSI BERAS DI INDONESIA

Helmi Noviar<sup>1</sup>

Email: [helminoviar@utu.ac.id](mailto:helminoviar@utu.ac.id)

## Abstrak

Tujuan makalah ini adalah untuk menilai implikasi dari impor PADI terhadap kesejahteraan petani dan beberapa faktor yang menyebabkan impor beras di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kumpulan data yang dihasilkan dari berbagai publikasi/penerbitan dari Biro Statistik Pusat Indonesia, dan sebelumnya membandingkan berbagai hasil yang menghasilkan publikasi jurnal. Hasil analisis dalam makalah ini, berdasarkan data terbaru, menemukan kesenjangan produksi antara produksi dan konsumsi yang didorong oleh laju pertumbuhan konsumsi tidak sesuai dengan laju pertumbuhan produksi. Dengan demikian, untuk melaksanakan masalah ini, pemerintah memerlukan kebijakan impor beras pada tahun 2014. ini menyiratkan penurunan daya beli petani (NTP) dan produksi petani (NTUP) yang pada tahun berikutnya meningkatkan produksi beras (2015) tetapi tidak dapat meningkatkan kedua indikator daya saing secara signifikan. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, pengenaan komoditas PADI harus dihitung dengan cermat dengan menggunakan prinsip yang tepat dan dalam waktu yang lama peningkatan produksi beras nasional harus dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana di sektor pertanian, serta akses terhadap Modal sehingga dapat menciptakan kerja sama profesional sebagai penghasil padi di Indonesia.

Keywords: beras impor, produksi-konsumsi Gap, NTP/NTUP.

## Abstract

*The purpose of this paper is to assess the implications of rice imports on the welfare of farmers and several factors that cause rice imports in Indonesia. The method used is a collection of data generated from various publications / publishing from the Indonesian Central Bureau of Statistics, and formerly comparing the various results that resulted in journal publications. The results of analysis in this paper, based on recent data, find the production gap between production and consumption which driven by the rate of consumption growth is not corresponding by the rate of growth of production. Thus, to carry out this issue, the government require import rice policy in 2014. This implies a decline in the purchasing power of farmers (NTP) and farmer production (NTUP) which in the next year increase rice production (2015) but it can not significantly boost both competitiveness indicators. Therefore, in the short run, the imposition of rice commodities must be carefully calculated using the right principles and in the long term the increase of national rice production must be done by improving facilities and infrastructure in the agricultural sector, and access to capital so as to create professional cooperation as rice producer in indonesia.*

Keywords: rice importation, production-consumption gap, NTP/NTUP.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar Meulaboh, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

## 1. Pendahuluan

Secara normal Indonesia tidak perlu mengimpor beras, akan tetapi menurut temuan McCulloch dan Timmer (2008) persoalan akan muncul ketika terjadi gejolak harga beras, misalnya kenaikan harga telah menimbulkan berbagai spekulasi dan manipulasi dalam perdagangan beras oleh para pedagang sehingga terjadi ketidakmerataan distribusi kelangkaan beras, perdebatan yang terjadi oleh para ahli adalah perdebatan tentang tingkat produksi dan konsumsi yang jika produksi kurang dari konsumsi maka impor beras dibenarkan (*justified*), dan jika dilihat dari pendapat (Rosner & McCulloch, 2008) data produksi beras Indonesia yang *over-estimated* 9-17% karena menggunakan kalkulasi dengan taksiran, sementara perhitungan tingkat konsumsi *under-estimated* sebab konsumsi rumah tangga yang mengkonsumsi di luar rumah tidak dihitung (Noviar, 2013). Sejalan dengan itu, Myint (1984) telah meragukan keadaan ini dengan mengatakan masalah fundamental yaitu ketahanan pangan Indonesia untuk jangka pendek dan dalam jangka panjang adalah bagaimana meningkatkan produktivitas di sektor pertanian secara keseluruhan sebagai *basis* terhadap pembangunan ekonomi (Myint, 1984). Pendapat tersebut dikemukakan pada saat Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984, dan kiranya benar seperti yang terdapat pada kajian (Rosner & McCulloch, 2008);(Dorosh, 2008) bahwa *food security* Indonesia tidaklah cukup kuat, terutama dalam menghadapi masalah kegagalan panen dan instabilitas ekonomi baik internal maupun eksternal yang berimplikasi luas terutama pada kemiskinan di wilayah pedesaan (*rural area*) (Ravallion & Van De Walle, 2008) ditambah lagi masalah alih fungsi lahan dan belum maksimalnya strategi diversifikasi pangan sebagai sebuah strategi jangka panjang.

Tulisan paper akan membahas persoalan impor beras dan implikasi kebijakan yang diperlukan. Bagian pertama akan membahas persoalan produksi beras dalam negeri, konsumsi atau kebutuhan beras nasional dalam kaitannya dengan impor, kedua persoalan kesejahteraan petani keberlangsungan usaha tani padi, ketiga akan diuraikan persoalan lahan dan penduduk. Bagian penutup akan diberikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pembahasan tersebut.

## 2. Tinjauan Pustaka

Studi Basu dan Wong (2014) dalam mengevaluasi program simpan pinjam di wilayah pedalaman Indonesia Timur menyebutkan bahwa pasar kredit dan tabungan yang tidak sempurna menyebabkan para petani produksi bahan pokok makanan melakukan panen dengan kata lain untuk mengkonversikan hasil panen (*harvest*) ke penyimpanan (*storage*) para petani mengalami kesulitan dalam mengakses kredit. Pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang menggunakan instrumen kebijakan yang bervariasi untuk mentransfer sumberdaya dari sektor pertanian ke sektor manufaktur, jika dilihat studi Basu dan Wong (2014) maka ketidaksimetrisan tersebut dapat menghambat transfer sumber daya yang dalam hal ini sektor pertanian sebagai penyedia faktor input kepada manufaktur atau sektor non pertanian (Basu & Wong, 2015). Inilah yang disebut oleh sebagai distorsi di sektor pertanian (*agricultural distortion*) dalam perubahan struktural di negara-negara berkembang (Grabowski, 2013);(Grabowski & Self, 2016).

Penelitian lainnya yang lebih panjang rentang waktunya terkait dengan pertumbuhan dan perubahan produktivitas serta dampak kebijakan terhadap pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia sejak 1880 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat terjadi pada masa orde baru, sejak Indonesia mencapai swasembada beras 1984/1985 di mana laju pertumbuhan yang

pesat tersebut yang disertai dengan berbagai kebijakan (*policies*) pemerintah pada masa itu yang cukup mempengaruhi sektor pertanian menyebabkan hasil produksi pertanian terutama padi yang mengalami peningkatan yang cukup berarti, dalam pada itu, permintaan domestik bahan makanan pokok terutama beras mengalami peningkatan yang pesat pula (Van der Eng, 1996). Dengan demikian, pencapaian swasembada beras pada masa itu memberikan makna yang cukup luas, pertama dari sisi produksi beras yang meningkat yang diikuti dengan permintaan beras domestik yang meningkat pula. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya pada ketergantungan pada beras impor.

Pengalaman di negara-negara berkembang berdasarkan studi Grabowsky untuk kasus di negara India membandingkannya dengan negara Cina pada dasarnya dengan pertumbuhan yang cepat melalui produktivitas tinggi menyebabkan menurunnya produktivitas di sektor pertanian, sebab terjadi *shift employment* akibat dari perubahan struktural dalam perekonomian (Grabowski, 2013);(Grabowski & Self, 2016). Tenaga kerja di sektor pertanian bermigrasi ke manufaktur atau sektor industri. Kondisi ini, dalam konteks Indonesia setelah mencapai swasembada beras terus mengalami kesulitan dalam mencapai produktivitas yang tinggi di sektor pertanian umumnya dan tentunya beras. Oleh karena itu, disarankan stabilitas harga pangan pokok merupakan kondisi yang kritis yang perlu penanganan serius oleh pemerintah (Grabowski & Self, 2016).

Instrumen kebijakan lainnya yang digunakan, terutama untuk bahan pangan (*staple crops*) adalah kebijakan impor. Setelah mencapai swasembada beras, secara perlahan pertumbuhan produksi padi mengalami penurunan secara rata-ratanya (Simatupang & Timmer, 2008). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hal ini mengindikasikan terjadinya distorsi dalam sektor pertanian, dalam pada itu kondisi menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan di pedesaan 23% dan perkotaan 33% (Yusuf & Sumner, 2015) sebab penduduk Indonesia utamanya mengkonsumsi beras atau dalam istilah oleh Ravallion & van de Walle (1991); (Rosner & McCulloch, 2008) dinamakan sebagai *net consumer of rice*. Oleh karena itu pemerintah sejak tahun 2004 mengambil kebijakan membatasi impor beras (*rice-import restriction*) (Yusuf dan Sumner, 2015 : 341). Sejalan dengan hal tersebut pembahasan kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang terkait dengan harga bahan makanan pokok (*staple food*) dilakukan terutama berkaitan dengan kebijakan yang menjaga supaya harga bahan makanan pokok domestik di bawah harga dunia, yang berimplikasi dalam upaya mengatasi kemiskinan yang tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan (Ravallion & van de Walle, 1991);(McCulloch, 2008). Disebutkan pula bahwa masyarakat miskin perkotaan sebagai, terutama di bagian Asia Selatan dan Asia Tenggara adalah *net consumer* dari bahan makanan pokok tersebut, sedangkan masyarakat di pedesaan selain *net producer* sekaligus juga *net consumer*.

### **3. Pembahasan**

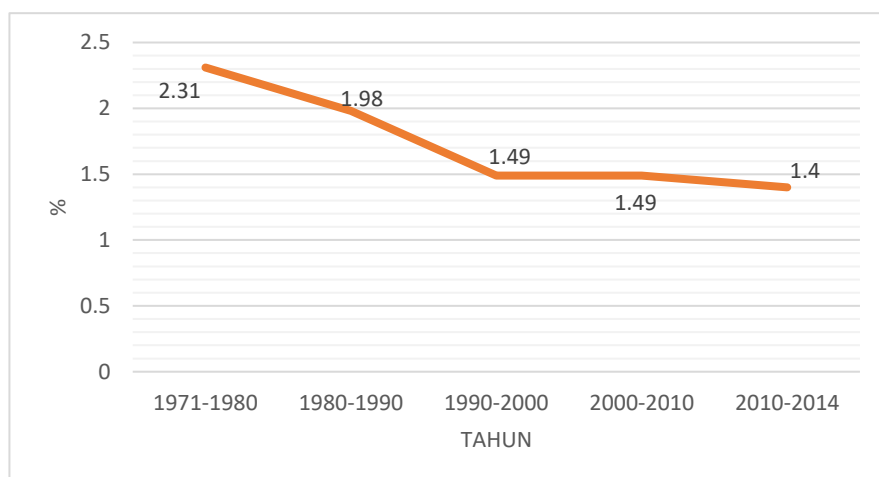
#### *3.1. Produksi dan konsumsi beras dalam negeri*

Perhitungan jumlah beras yang dihasilkan dan dibutuhkan untuk konsumsi dalam negeri memerlukan sejumlah asumsi sehingga akan didapat suatu jumlah produksi yang mendekati realitas terhadap ketersediaan beras domestik. Hal ini penting dilakukan sebab beras merupakan makanan pokok (*staple crop*) yang menyangkut kebutuhan primer masyarakat pedesaan dan perkotaan.

Penaksiran jumlah konsumsi ada dua faktor utama yang menjadi asumsi dasar yaitu jumlah penduduk dan rendemen (konversi padi menjadi beras) yaitu

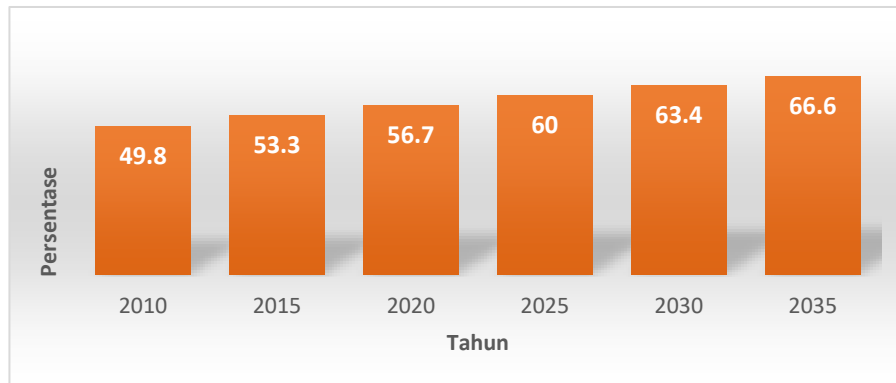
produksi gabah (padi) kering dikurang (gabah tercecer 5,4%; kebutuhan bibit 39,67% kg/ha; makanan ternak 2%; konversi gabah ke beras 63%;beras tercecer 2,5% (Noviar, 2013). Perkiraan jumlah produksi beras Indonesia dan konsumsi terlihat jelas terjadi kesenjangan antara produksi beras nasional dengan tingkat konsumsi (*production-consumption gap*). Kondisi kritis terjadi pada saat kesenjangan cenderung melebar, maka pada kondisi ini impor beras menjadi salah satu solusi jangka pendek bagi pemerintah untuk memenuhi dan memperkuat cadangan (*stock*) kebutuhan beras nasional selama satu tahun, misalnya impor di tahun 2014 sebesar 8 juta ton. Impor beras merupakan solusi jangka pendek, akan tetapi memberikan dampak yang cukup berarti pada kesejahteraan petani, permasalahan ini akan kita bahas dalam bagian berikut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penduduk merupakan salah satu faktor penentu estimasi konsumsi beras, jika asumsi Ravallion & van de Walle (1991); Rosner & McCulloch (2008) bahwa masyarakat perkotaan adalah *net consumer* dan pedesaan produsen dan konsumen, maka bagi masyarakat perkotaan hal ini tidak akan mendatangkan masalah, tetapi bagi masyarakat pedesaan dan para petani hal ini akan memberikan dampak yang luas maka ini tentu memerlukan kajian bagaimana mendapatkan titik keseimbangan dalam jangka panjang antara produksi dan konsumsi di pedesaan dan konsumsi di wilayah perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian Yusuf dan Yusuf & Sumner (2015), impor memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemiskinan di pedesaan sebesar 23% dan perkotaan 33%, oleh karenanya perlu dibatasi (*import restrictions*). Apabila ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk, maka lajunya masih dapat diatasi sebesar 1,4%, tetapi komposisi penduduk proyeksi BPS yang mengkhawatirkan sebab BPS memperkirakan jumlah penduduk di perkotaan akan cenderung meningkat bahkan akan mencapai 66,6%. Maka revitalisasi sektor pertanian, terutama bahan makanan pokok (*staple crops*) akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah terutama dalam penawaran tenaga kerja di sektor pertanian, sementara di perkotaan akan bertambah beban konsumsi sebab masyarakat di perkotaan *net consumer* seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Program subsidi dan evaluasi kredit diperlukan (Basu & Wong, 2015), tetapi jumlah dan akses kredit yang merata dalam mengatasi kesenjangan konsumsi-produksi menjadi faktor kondisi kritis namun tetap pada kondisi yang produktif.



Sumber: Data BPS, 2016.

Gambar 1. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia (1971-2014)



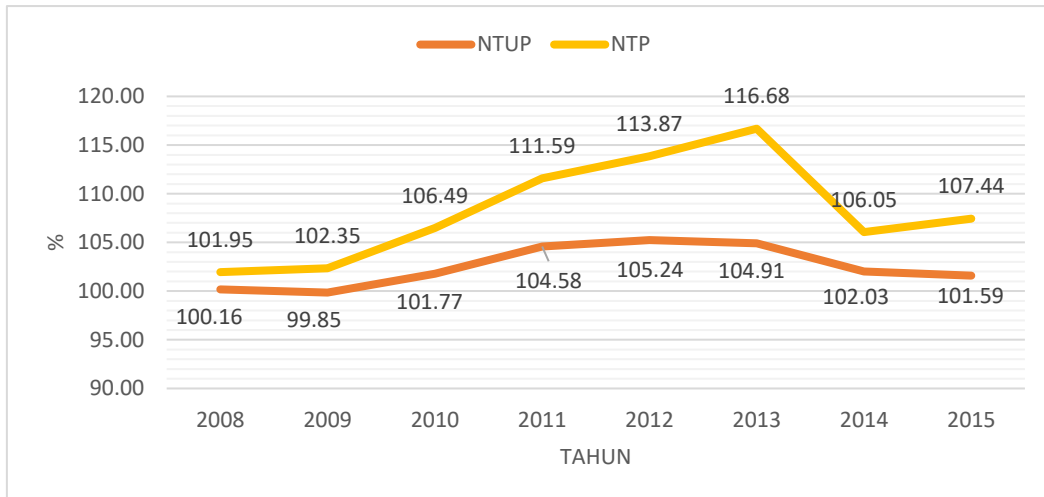
Sumber: Data BPS, 2016.

Gambar 2. Persentase Penduduk Indonesia di Daerah Perkotaan 2010-2035

### 3.2 Kesejahteraan petani padi

Nilai tukar petani merupakan adalah satu indikator kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan atau dijual petani dibandingkan dengan kebutuhan petani baik untuk proses produksi maupun konsumsi rumah tangga petani (BPS, 2016). Jika NTP lebih besar dari 100 maka kemampuan daya beli petani dalam periode tersebut lebih baik dibandingkan tahun dasar begitu pula sebaliknya.

Nilai tukar usaha pertanian (NTUP) merupakan indikator kemampuan produksi petani dengan membandingkan produksi dan biaya produksi. Dengan kata lain mengukur tingkat keberhasilan usaha pertanian berdasarkan pendapatan yang diterima dari kenaikan dan penurunan biaya produksinya dibandingkan dengan kenaikan atau penurunan harga barang/jasa untuk proses produksi yang dibeli (BPS, 2016). Perkembangan kedua jenis indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data BPS, berbagai terbitan, 2016

Keterangan: tahun 2008-2011 menggunakan tahun dasar 2007, sedangkan mulai tahun 2013 menggunakan tahun dasar 2012

Gambar 3. Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) 2008-2015

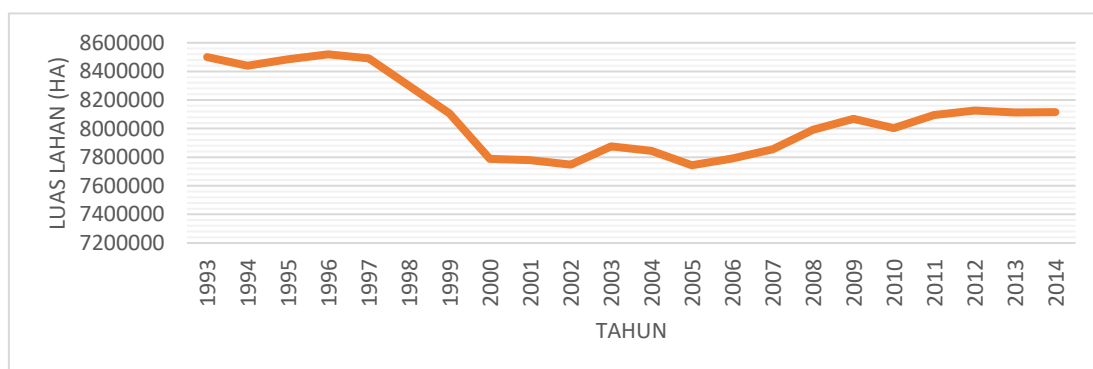
Nilai tukar petani (*terms of trade*) dari tahun 2008 s/d 2013 menunjukkan trend meningkat, yang bermakna kemampuan daya beli petani dari hasil produksinya mengalami perbaikan dengan kata lain kesejahteraan petani dapat dicapai pada periode ini. Produksi padi pada periode ini mencapai 60,3 juta ton sampai 71,2 juta ton di tahun 2013 (lihat data LAMPIRAN 1), implikasinya dengan kemampuan produksi seperti ini dalam periode tersebut walaupun dilakukan impor beras tetapi masih bisa menunjang kebutuhan konsumsi beras dalam negeri. Setelah periode ini, rasio NTP menurun secara tajam 106,05% sama halnya dengan tahun 2010 artinya tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan yang cukup berarti hal ini berimplikasi pada turunnya produksi padi nasional di tahun 2014 sebesar 70,8 juta ton dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 sebesar 75,3 juta ton, walaupun kesejahteraan meningkat tetapi tingkat kenaikannya hanya 1% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 107,44%. Jika ditelusuri kondisi yang terjadi setelah 2013 menyebabkan impor beras meningkat di tahun 2014 sebesar 8 juta ton, hal ini tentu berimplikasi pada harga beras domestik dan ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah produksi di tahun 2015. Jika demikian halnya maka kemampuan produksi petani menjadi menurun seperti yang tercermin pada nilai tukar usaha pertanian (NTUP) di tahun 2015 sebesar 101,59 yang merupakan gejala bahwa kemampuan produksi petani turun akibat dari rasio pendapatan dari hasil petani tidak sebanding dengan biaya produksinya. Penerapan adopsi teknologi dalam pertanian merupakan salah satu solusi menekan biaya produksi yang tentunya membutuhkan investasi, selaras dengan ini studi Afolami, Obayelu, & Vaughan (2015) di Nigeria sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat kemiskinan di negara tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran Ravallion & van de Walle (1991); Rosner & McCulloch (2008) bahwa masyarakat perkotaan merupakan *net consumer* sedangkan masyarakat pedesaan merupakan produsen sekaligus konsumen, dalam kasus makanan pokok beras (*staple crops*) implikasi secara luas terjadi di wilayah pedesaan, angka kemiskinan akan meningkat seperti yang telah ditemukan oleh Yusuf dan Sumner (2015), akan tetapi cadangan (*stock*) beras nasional ditambah dengan impor yang relatif tinggi di tahun 2014 menyebabkan NTP dan NTUP petani

bergerak secara lamban atau dengan kata lain kedua indikator kesejahteraan masyarakat petani umumnya dan petani padi khususnya menjadi terhambat lajunya. Hal inilah sebagai distorsi dalam pertanian, dan dalam kasus ini impor di tahun 2014 menyebabkan terjadinya distorsi pada peningkatan kesejahteraan petani dan sekaligus sebagai pemicu meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di pedesaan atau sektor pertanian khususnya, beberapa studi empiris telah membuktikan hal tersebut (Basu & Wong, 2015) persoalan surplus dan penyimpanan stok pangan di Sulawesi yang masih membutuhkan modal; kemudian studi dinamika konsumsi beras bersubsidi (raskin) yang belum efektif dalam menekan angka kemiskinan (Suriani et al, 2016).

Kondisi ini tampaknya simetris dengan studi Grabowsky (2013) untuk kasus di negara India, di mana ditemukan terjadinya *shift employment* akibat turunnya produktivitas di sektor pertanian yang disebabkan perubahan struktural. Namun demikian untuk kasus produksi dan impor beras di Indonesia membutuhkan kajian yang lebih mendalam tentang hal ini, tetapi yang jelas adalah menurunnya NTP dan NTUP menunjukkan gejala ke arah tersebut, petani maupun petani pekerja tentunya membutuhkan alternatif penghasilan dari sumber lainnya.

Dalam jangka panjang penyebab lain turunnya produksi padi adalah alih fungsi lahan yang tercermin pada angka luas lahan yang cenderung turun setiap tahunnya seperti pada gambar berikut:



Sumber: Data BPS, 2016.

Gambar 4. Luas tanam sawah (*wet land*) 1993-2014

Pemerintah menyadari bahwa kondisi lahan sawah merupakan salah satu faktor penting dalam produksi pertanian, ditambah lagi dengan isu lingkungan dan ekologi yang harus menjadi perhatian secara serius oleh pemerintah. Gejala turunnya luas lahan sawah yang siap untuk ditanam menurun secara tajam mulai tahun 1997-2000, isu konversi lahan atau alih fungsi lahan menjadi kawasan perumahan, industri dan lainnya merupakan faktor penyebabnya, terutama di wilayah pulau Jawa seperti yang pernah ditemukan oleh Simatupang dan Timmer (2008). Dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk merevitalisasi lahan terutama sawah tidak hanya membuka lahan baru, tetapi juga distribusi kepemilikan lahan yang juga perlu menjadi perhatian agar tidak hanya mencapai target produksi beras domestik yang tinggi tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan, seperti yang pernah terjadi di Vietnam faktor lahan menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatnya kemiskinan di wilayah pedalaman Vietnam (Ravallion & Van De Walle, 2008).

Pentingnya masalah ini, mulai tahun 2005 luas lahan mengalami trend yang meningkat, dan luas panen pun berkembang pesat pada tahun 2009 sebesar 4,51%

dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan produksi mencapai 6,75% atau meningkat sebanyak 4 juta ton lebih dengan total produksi pada tahun itu sebesar 64,3 juta ton. Perkembangan yang menarik adalah pada tahun produksi 2015 dimana kondisi luas lahan mengalami tidak mengalami perubahan yang cukup berarti namun produksi mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan intensifikasi penggunaan lahan semakin membaik sehingga produksi ganda (*double*) mulai menampakkan hasilnya, dengan kata lain peran teknologi memberikan kontribusi dalam capaian produksi 2015.

## 4. Penutup

### 4.1 Kesimpulan

Persoalan yang ditimbulkan akibat mengimpor beras sangatlah kompleks, namun demikian berdasarkan analisis data-data yang tersedia dan membandingkannya dengan sejumlah kajian empiris terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Produksi beras domestik cukup berfluktuasi, ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhinya namun faktor yang bisa dikendalikan seperti tenaga kerja terjadinya *shifting labor*, luas tanam yang semakin berkurang adalah titik fokus dari analisis ini yang memerlukan solusi dari berbagai pihak.
- 2) Tingkat kesejahteraan petani dalam beberapa periode terakhir terlihat semakin menurun baik dari sisi daya beli (NTP), maupun daya produksi petani (NTUP) salah satu faktor penyebabnya adalah jumlah beras impor yang masuk sehingga berdampak ketersediaan cadangan beras yang berlebih sementara pada periode yang sama tingkat produksi padi domestik meningkat secara signifikan. Sehingga impor beras memberikan kontribusi yang signifikan terhadap meningkatnya angka kemiskinan.
- 3) Persoalan konsumsi dan produksi nasional, berdasarkan data-data yang tersedia menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar dalam periode terakhir (2013-2015), penyebab utamanya komposisi penduduk kota yang merupakan *net consumer* cenderung meningkat berdasarkan data terakhir dan proyeksi BPS pun ke depannya akan didominasi penduduk kota atau 66% : 34%.

### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya:

- 1) Pengendalian produksi beras nasional memerlukan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek penambahan dan pemanfaatan lahan secara optimal perlu dievaluasi dan didistribusi. Dalam jangka panjang kebutuhan beras nasional harus dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, solusinya adalah infrastruktur pertanian yang baik melalui kecukupan sumber air dari irigasi, akses pasar, akses modal dan tentunya akses informasi terutama masalah harga input dan output.
- 2) Dalam jangka panjang impor dibatasi pada beras tertentu berkualitas tinggi untuk konsumsi tertentu. Sebab impor dalam jangka pendek, berdasarkan analisis menyebabkan terjadinya distorsi dalam pertanian (*agricultural distortions*), khusus pada petani padi yang implikasinya dapat dilihat dari *shifting of labor* di mana pekerja mencari alternatif sumber pendapatan salah satunya dengan



bermigrasi ke kota ke sektor manufaktur, terutama pada pekerja buruh kasar dan sebagainya.

- 3) Mencegah terjadinya *shifting of labor*, dengan kata lain membuat petani padi khususnya benar-benar nyaman dalam bekerja, tentunya jaminan kesejahteraan melalui pengendalian harga, akses pasar dan akses modal yang lebih luas. Sehingga daya beli (NTP) dan daya produksi (NTUP) petani meningkat dan lebih kompetitif.
- 4) Program diversifikasi konsumsi pangan, merupakan solusi jangka panjang yang bisa dilakukan untuk mengendalikan kesenjangan konsumsi beras dan produksi yang cenderung meningkat.
- 5) Keterbatasan artikel ini masih memerlukan pengujian statistik inferensial yang tentunya menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## Daftar Pustaka

- Afolami, C. A., Obayelu, A. E., & Vaughan, I. I. (2015). Welfare impact of adoption of improved cassava varieties by rural households in South Western Nigeria. *Agricultural and Food Economics*, 18(3), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s40100-015-0037-2>
- Basu, K., & Wong, M. (2015). Evaluating seasonal food storage and credit programs in east Indonesia ☆. *Journal of Development Economics*, 115, 200–216. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.02.001>
- Dorosh, P. A. (2008). Food Price Stabilisation and Food Security: International Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 93–114. <https://doi.org/10.1080/00074910802001603>
- Grabowski, R. (2013). Journal of Asian Economics Agricultural distortions and structural change. *Journal of Asian Economics*, 24, 17–25. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2012.10.002>
- Grabowski, R., & Self, S. (2016). Staple food price instability and structural change : Indonesian experience. *Journal of Asian Economics*, 47, 35–44. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.10.001>
- McCulloch, N. (2008). Rice prices and poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 45–63. <https://doi.org/10.1080/00074910802001579>
- Myint, H. (1984). Inward and outward-looking countries revisited: The case of Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 20(2), 39–52. <https://doi.org/10.1080/00074918412331334602>
- Noviar, H. (2013). Analisis kecukupan dan ketersediaan beras di Indonesia (1975-2009). *Pasai*, 7(1), 93–104.
- Ravallion, M., & van de Walle, D. (1991). The impact on poverty of food pricing reforms: A welfare analysis for Indonesia. *Journal of Policy Modeling*, 13(2), 281–299. [https://doi.org/10.1016/0161-8938\(91\)90015-Q](https://doi.org/10.1016/0161-8938(91)90015-Q)
- Ravallion, M., & Van De Walle, D. (2008). *Land in Transition*. World Bank-Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7274-6>
- Rosner, L. P., & McCulloch, N. (2008). A note on rice production, consumption and import data in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 81–92. <https://doi.org/10.1080/00074910802001595>
- Simatupang, P., & Timmer, C. P. (2008). Indonesian rice production: Policies and realities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 65–79. <https://doi.org/10.1080/00074910802001587>
- Suriani, Diana Sapha A.H., & Cut Zakia Rizki (2016). *Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi: Analisis Beras Miskin (Raskin) di Provinsi Aceh*. Darussalam-Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Van der Eng, P. (1996). *Agricultural growth in Indonesia: Productivity change and Policy impact since 1880* (First edit). London: MacMillan.
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 323–348. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1110685>